



Pemkab Gagal Kelola Aset

■ Bupati Targetkan Predikat WTP

MELAWI, TRIBUN - Dalam dua tahun terakhir, Pemkab Melawi harus puas dengan pencapaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Kalbar.

Pasalnya, untuk mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemkab Melawi masih terkendala soal aset daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Melawi 2014.

"Sebenarnya Melawi bisa mendapatkan WTP kalau pengelolaan asetnya tidak ada masalah. Maklum kita ini daerah pemekaran, jadi masih ada beberapa aset yang perlu dibenahi. Kedepan target kita harus WTP," kata Bupati Melawi, Firman Muntaco, belum lama ini.

Ini merupakan kedua kali secara beruntun Melawi mendapat WDP sejak dimekarkan 10 tahun silam. Untuk beberapa tahun sebelumnya, predikat yang



TRIBUNDOK Bupati Melawi

diberikan BPK RI adalah, tidak wajar. Dengan pencapaian tersebut, bupati mengaku saat ini sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya.

Adapun sejumlah aset Pemkab yang masih bermasalah adalah mengenai sertifikasi tanah yang kini sudah didirikan sejumlah bangunan, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSU-D) Melawi. Bahkan ada beberapa tanah yang hingga kini belum memiliki sertifikat resmi.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Melawi, Ramda Suhaimi mengungkapkan, untuk membenahi persoalan aset, langkah yang akan

” Maklum kita ini daerah pemekaran, jadi masih ada beberapa aset yang perlu dibenahi. Ke depan target kita harus WTP. ”

FIRMAN MUNTACO

dilakukan adalah melakukan pendataan kembali sejumlah aset yang belum ada nilainya.

"Seperti soal aset tanah hibah dari Kabupaten Sintang, ada beberapa yang belum ada nilainya. Nanti akan kita proses kembali nilai-nilainya, berapa harganya tanah ini, termasuk menghapuskan sejumlah aset yang kemungkinan usianya sudah tidak memungkinkan lagi," katanya.

Ramda yakin dengan perbaikan atau penataan aset, Melawi bisa meraih WTP sesuai dengan yang diharapkan bupati. Sebab selain mempermudah proses administrasi, WTP memang sudah menjadi target pemerintah.

"Target kita WTP, karena beberapa catatan dari BPK memang soal aset, untuk sekarang laporan aset tiap bulan kita sampaikan, jadi kita juga berkoordinasi dengan setiap SKPD sehingga saat pemetaan bermasalah bisa segera kita selesaikan," katanya.

Dia mengatakan, koordinasi dengan SKPD perlu dilakukan karena DPPKAD merupakan himpunan tiap SKPD.

Direktur RSUD Melawi, Tanjung Harapan Tampubolon mengungkapkan, tidak adanya sertifikat menjadi penghambat RSUD belum bisa naik tipe dari D ke C. Ia pun berharap bagian aset bisa segera menyelesaikannya. (ati)

Segera Perbaiki

WAKIL Ketua DPRD Melawi, Kluisen, berharap Pemkab Melawi melalui SKPD terkait segera membenahi persoalan yang dihadapi, agar cita-cita mendapatkan WTP bisa terwujud.

"Harus diupayakan, apa yang menjadi masalah sehingga menghambat persoalan itu. Seperti masalah rumah sakit ini juga harus segera diperbaiki supaya pelayanan di sana men-

jadi lebih baik," pintanya.

Namun, kata Kluisen, perbaikan administrasi dan aset yang dilakukan pemerintah jangan hanya karena ingin mengejar WTP. Melainkan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak, sehingga dampaknya juga dirasakan.

"Kalau mendapatkan WTP namun pelayanan masih sama saja, kan tidak ada gunanya. Yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat," katanya. (ati)